

Kajian kelayakan pelaksanaan sistem lelang elektronik (e-procurement) pada instansi pemerintah ditinjau dari prasyarat pelaksanaan. (Studi kasus: proyek paket pembangunan jalan Eretan Kulon - Loh Bener) = Investigating feasibility of implementation of eprocurement system in government agency considering of implementing prerequisite. (Case study of Proyek Paket Pembangunan Jalan Eretan Kulon-Lohbener II)

Florence Gokmauli L., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=123206&lokasi=lokal>

Abstrak

Pada Sistem Pengadaan Barang dan jasa di Indonesia telah mulai diterapkan sistem <i>e-procurement</i>. Pada Sistem <i>e-procurement</i> seluruh proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pengumuman pemenang akan dilakukan secara online melalui situs internet (<i>website</i>). Semakin luasnya akses internet oleh masyarakat khususnya di lingkungan pelaku bisnis konstruksi telah menjadikan <i>e-procurement</i> ini feasible diterapkan dan menjadi suatu kebutuhan bagi pemerintahan yang modern. <i>E-Procurement</i> dipercaya sebagai alat/ instrumen untuk peningkatan <i>good governance</i> dan pelayanan public karena akan meningkatkan efisiensi biaya, efektifitas, waktu siklus yang lebih cepat, meningkatkan transparansi paket pekerjaan yang dilelang, menyediakan public monitoring yang lebih baik, meningkatkan persaingan yang sehat, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dari sisi penyedia jasa konstruksi, keberhasilan dalam mengikuti sistem lelang adalah salah satu faktor penentu kelangsungan hidup perusahaan.

Tulisan ini merupakan hasil studi dalam mengenali karakteristik prasyarat pelaksanaan yang ada saat ini di Departemen Pekerjaan Umum (DPU) yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan mengenai kajian kelayakan pelaksanaan system lelang elektronik yang diadakan. Sudut pandang yang diambil adalah dari sudut pandang penyedia jasa. Proses yang dilakukan adalah pengumpulan data-data lewat penelusuran dokumen lelang, wawancara, dan penyebaran kuesioner guna mengetahui karakteristik prasyarat pelaksanaannya. Dari hasil proses tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat evaluatif. Saat ini di DPU, Sistem Lelang Elektronik belum dapat dilaksanakan optimal karena belum dipenuhinya 3 prasyarat pelaksanaan yaitu: hukum, manajemen dan teknis.

<hr>

In Indonesia Procurement System, have started implementation e-procurement. In EProcurement, all processes of bidding start from announcement, bid proposal, selection, until announcement of the winner of the bidding is doing online via internet (website). Internet access have used widely specially in environment of construction bussiness player have caused e-procurement is feasible to implement and being needing for modern goverment. They believe E-Procurement can be instrument for increasing implementation good governance and public service because will increase cost efficiency, effectivity, shorten cyclus time, transparency of Bidding Package, better public monitoring, provide more fair competition, and increasing accountability. In view side of suppliers/vendors, the successfull of participated in procurement system is one of the determining factor of company performance.

This paper is the result of study in recognized characteristic of implementing prerequisite in Public Works Department then will can get conclusion about feasibility of e-procurement implementation system that have done. The side view is suppliers/vendors. The process have done for this study is collecting data by bidding document treasury, interview, and questionnaire for knowing characteristic of implementing prerequisite. From the result of that process is conclusion that have evaluation nature. For Now in Public Works Department, e-procurement system can not do optimal cause not fullfill the implementing Prerequisite : law, management, and technicality.